

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam tercapainya laporan keuangan yang berkualitas dan merupakan penunjang dalam penyusunan laporan keuangan. Keberhasilan entitas bukan hanya dari sumber daya manusianya saja, tetapi sumber daya yang memiliki kompetensi. Kompetensi sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan. (Wati, dkk, 2014)

Sumber daya manusia yang menjalankan serangkaian proses dan standar akuntansi pemerintahan adalah hal yang sangat berkaitan dengan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. Sedikit sekali sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang akuntansi, relatif sudah tua, kurang sekali pendidikan atau pelatihan tentang akuntansi untuk para staff, dan tidak adanya latar belakang akuntansi merupakan salah satu faktor permasalahan akuntansi di pemerintahan Indonesia.

Selain sumber daya manusia, dokumen-dokumen kelengkapan juga merupakan penunjang dalam penyusunan laporan keuangan. Dokumen-dokumen pendukung seperti berita acara dan sebagainya sangat dibutuhkan. Kegunaannya adalah untuk pembandingan antara CALK dengan kejadian atau kegiatan yang sebenarnya terjadi dan bisa juga menjadi bukti atau acuan dalam pembuatan laporan keuangan yang nantinya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setelah itu, BPK akan menentukan opini apa yang sesuai untuk laporan keuangan tersebut, apakah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), atau *Disclaimer*. Semua itu tergantung bagaimana isi laporan keuangan tersebut apakah sudah sesuai atau belum.

Dalam Berita dijelaskan bahwa Kabupaten Cirebon 2 tahun berurut-turut tahun 2016 dan tahun 2017 laporan keuangannya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Seperti dijelaskan dalam berita bahwa Pemerintah Kota Cirebon kembali meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dan peraihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2017.

Penanggungjawab Walikota Cirebon, Dedi Taufik, mengungkapkan keberhasilan penghargaan ini dibangun atas jerih payah dan hasil kerjasama dari semua pihak. Dia menjelaskan bahwa Kabupaten Cirebon mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) didasarkan pada beberapa kriteria. Kriteria yang dimaksud yaitu, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Dikutip dari media elektronik jabar.pojoksatu.id pada tanggal 30 Mei 2018.

Dalam berita selanjutnya, dijelaskan bahwa setelah Kabupaten Cirebon mendapatkan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka Wali Kota Kabupaten Cirebon mempersilahkan BPK RI untuk memeriksa kembali semua Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Cirebon. Pemeriksaan ini dianggap penting, karena tujuannya untuk memperbaiki manajemen tata kelola keuangan Pemda Kota Cirebon. “Apalagi kita sudah dua kali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ungkap Azis. Opini tersebut harus dipertahankan dan menjadi alat pemicu bagi seluruh jajaran Pemda Kota Cirebon untuk menyajikan yang terbaik dalam tata kelola keuangan pemerintahan di daerah. Bahkan Azis menekankan agar tindaklanjut dari setiap temuan yang ada di LHP harus mencapai 90 persen. “Tadi saya dapatkan informasi, tindak lanjut dari temuan LHP kita baru 64 persen. Ini yang harus kita tingkatkan,” ungkap Azis. Dapat disimpulkan dari fenomena yang telah dijelaskan, bahwa Kabupaten Cirebon mengalami pemeriksaan kembali terhadap setiap SKPD nya walaupun sudah mendapatkan WTP selama dua tahun berturut-turut. Yang dimana berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, sebagai faktor pendukung pemilihan tempat observasi yang akan dilakukan. Berita yang dikutip oleh Yoga Pramono dalam cirebonkota.go.id pada 6 Februari 2019.

Dibalik hasil yang memuaskan tersebut, ternyata masih ada kekurangan atau kendala yang dialami dalam proses pembuatan laporan keuangan di Kabupaten Cirebon ini. Berdasarkan pernyataan dari Key Informan (KI) 1 dijelaskan bahwa:

“Kendala secara sdm, waktu mungkin ya, terus apa ya pendukungnya bisa jadi ya itu kebijakan kebijakan yang biasa menyulitkan kita. Cuma kita secara maksimal mengurangi kendala itu agar tetap berjalan laporan keuangannya”

Salah satu kendala yang didapatkan dalam proses penyusunan laporan keuangan di Kabupaten Cirebon adalah masalah sumber daya manusianya. Padahal sumber daya manusia sangat penting untuk menunjang akuntansi pemerintah berbasis akrual ini. Akan tetapi itu malah menjadi penyebab utama dalam proses penyusunan laporan keuangan. Kabupaten Cirebon memiliki keterbatasan sumber daya manusianya. Menurut KI 1 dijelaskan bahwa:

“Macem macem ya bisa dihitung ya untuk akuntansi di SKPD yang basik pendidikan akuntansi hanya 1 atau 2 orang ya itu yang lainnya itu bahkan banyak sekali khususnya di kecamatan sdmnya itu yang menyusun laporan keuangan orangnya itu yg menyusun laporan realisasi anggaran, itu yg membuat perencanaannya juga itu jadi tidak fokus. Sedangkan sdmnya yg kita punya terbatas. Kita di subbid akuntansi dan pelaporan masih di subbid jadi kita hanya mempunyai 4 pelaksana untuk melayani SKPD sebanyak 74 SKPD yg notabane kebanyakan basic pendidikan mereka bukan akuntansi jd kita harus menerangkan dasar akun dulu dan jadi kita melakukan rekon perbulan itu salah satu bentuk usaha kami di subbid akuntansi.”

Dilihat dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa tingkat pemahaman masing-masing individu atau sumber daya manusianya masih kurang sekali. Bahkan yang menyusun laporan keuangan saja bukan dari basik akuntansi. Yang memiliki basik akutansinya hanya sedikit dan bisa dihitung jari. Kalau sumber daya manusianya seperti itu, laporan keuangan akan menjadi tidak berkualitas dan tidak layak untuk dilaporkan.

Sangat diperlukan sekali sumber daya manusia yang kompeten untuk dapat menerapkan akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi saja tidak cukup. Mereka harus dilatih agar dapat melakukan penyesuaian terhadap pengetahuan akuntansi pemerintahan yang berbeda dari sebelumnya. Bisa dibayangkan bagaimana sulitnya penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual apabila sumber daya manusia yang menyusunnya tidak memiliki latar belakang akuntansi dan tidak memiliki tingkat pemahaman yang baik.

Oleh karena itu, sangat dibutuhkan pelatihan yang rutin dan intensif apabila jumlah sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dilingkungan akuntansi pada SKPD tidak banyak atau tidak tersedia. Pelatihan dapat berupa kegiatan pendampingan, penyuluhan dan lain-lain. Untuk kabupaten Cirebon sendiri mereka mendatangkan beberapa konsultan untuk mendampingi para sumber daya manusia dalam menyusun laporan keuangannya. KI 1 memberikan pernyataan sebagai berikut:

“kita meminta pendampingan dari Indgaf untuk membantu kita dalam penyusunan laporan keuangan karena tenaga kami yang terbatas untuk melayani 74 skpd jadi kita meminta jasa konsultan untuk melakukan pendampingan itupun satu bentuk sharing ilmu juga barangkali kalo jasa pendamping untuk ilmu akuntansinya berkembang terus barangkali kita yg ketinggalan informasi satu bentuk sharing juga”

Untuk saat ini memang kegiatan pendampingan sangat dibutuhkan dalam membantu sumber daya manusia menyusun laporan keuangan. Apalagi karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki dan keterbatasan sumber daya yang tingkat pemahamannya kurang dalam menyusun laporan keuangan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dibalik kesempurnaan Kabupaten Cirebon yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ternyata tingkat pemahaman dari masing-masing individu atau SKPD yang membuat laporan keuangan masih sangat kurang. Dan sangat dibutuhkan sekalian kegiatan pendampingan untuk membantu tiap individu dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu, yaitu dari Yuliani dan Agustini (2016) yang menyatakan bahwa Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, karena sub bagian akuntansi atau keuangan SKPD di Kabupaten Magelang memiliki kompetensi sumber daya manusia yang kurang memadai dari segi kuantitas dan kualitas dalam pembuatan laporan keuangan yang berkualitas, sedangkan pada penelitian Djuhari (2012) dijelaskan bahwa sebagian besar penyusun laporan keuangan BKM di Kabupaten Malang telah cukup memahami laporan keuangan, namun pada praktiknya penyusun laporan keuangan masih bingung karena buku catatan yang digunakan terlalu banyak, sehingga para penyusun laporan keuangan merasa enggan untuk mengulangi catatan pada buku-buku catatan lainnya yang saling terkait. Oleh karena itu perlu adanya pelatihan dan pembinaan agar dapat membuat laporan keuangan dengan baik dan benar sesuai SAP.

Berdasarkan hasil pra-riset dan penelitian terdahulu yang telah dilakukan dan dijelaskan, akan dilakukan penelitian yang berjudul **Analisis Tingkat Pemahaman SDM dan Kegiatan Pendampingan Dalam Proses Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

1.2 Fokus Penelitian

Perubahan peraturan pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005 menjadi PP Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan dan Permendagri 64 tahun 2013 tentang penerapan SAP berbasis akrual di Pemerintah Daerah mengakibatkan adanya perubahan dalam penyusunan laporan keuangan. Sebelumnya laporan keuangan menggunakan standar akuntansi berbasis kas menuju akrual (*Cash Toward Accrual*), tetapi semenjak terjadinya perubahan peraturan laporan keuangan menggunakan standar akuntansi berbasis akrual. Setelah adanya revisi tersebut mengakibatkan tingkat pemahaman sumber daya manusia yang menyusun laporan keuangan sangat kurang dan butuh sekali kegiatan pendampingan.

Penelitian ini berfokus pada tingkat pemahaman sumber daya manusia dan kegiatan pendampingan dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan berbasis akrual di Kabupaten Cirebon.

1.3 Perumusan Masalah

- a. Bagaimana tingkat pemahaman sumber daya manusia dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual di Kabupaten Cirebon?
- b. Bagaimana kegiatan pendampingan dapat membantu dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual?

1.4 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman sumber daya manusia dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual di Kabupaten Cirebon.
- b. Untuk mengetahui bagaimana kegiatan pendampingan dapat membantu dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual di Kabupaten Cirebon.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau wawasan mengenai tingkat pemahaman dan kegiatan pendampingan dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual di Kabupaten Cirebon.

b. Manfaat Praktisi

Diharapkan hasil penelitian yang diperoleh dapat berguna bagi masyarakat dan dapat memperluas wawasan mengenai praktik proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual di kabupaten Cirebon terutama mengenai tingkat pemahaman sumber daya manusia dan kegiatan pendampingan yang dilakukan.

